

The Effect of Communication Patterns and Leadership Style on Financial Performance with Education Level as a Moderating Variable in Beji District

[Pengaruh Pola Komunikasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi di Kecamatan Beji]

Amanda Aprilya Firdaus¹⁾, Akhmad Mulyadi²⁾

¹⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾ Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: akhmadmulyadi@umsida.ac.id

Abstract. *This study aims to examine the effect of communication patterns and leadership style on village government financial performance, with education level serving as a moderating variable. The study employed a quantitative approach involving village government officials in Beji District. A sample of 100 respondents was selected using purposive sampling. Data were collected through questionnaires and analyzed using the Partial Least Squares (PLS) method. The findings indicate that communication patterns, leadership style, and education level have a positive and significant effect on village government financial performance. However, education level is not able to moderate the relationship between communication patterns and financial performance, nor the relationship between leadership style and financial performance. These results suggest that effective communication, appropriate leadership style, and higher education levels contribute to improving village government financial performance. Nevertheless, education level does not strengthen or weaken the influence of communication patterns and leadership style on financial performance. Therefore, improving financial performance requires not only educational qualifications but also effective organizational communication and leadership practices.*

Keywords - Communication Patterns, Leadership Style, Village Government Financial Performance, Education Level.

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan melibatkan aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji. Sampel penelitian berjumlah 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dan dianalisis menggunakan metode Partial Least Squares (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Namun, tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi hubungan antara pola komunikasi dan kinerja keuangan pemerintah desa maupun hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif, gaya kepemimpinan yang tepat, serta tingkat pendidikan yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Akan tetapi, tingkat pendidikan tidak berperan dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa memerlukan dukungan komunikasi organisasi dan kepemimpinan yang efektif selain kualitas sumber daya manusia yang memadai.*

Kata Kunci - Pola Komunikasi, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, Tingkat Pendidikan

I. PENDAHULUAN

Keuangan pemerintah desa merupakan sistem pengelolaan yang mengatur pendapatan dan belanja desa agar dilaksanakan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur serta mengelola keuangannya sendiri, termasuk Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat. Sebelum diberlakukannya regulasi tersebut, pemerintah desa masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah daerah. Kinerja keuangan pemerintah desa menggambarkan tingkat keberhasilan desa dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu periode anggaran. Penilaian terhadap kinerja keuangan umumnya dilihat dari aspek produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, dan akuntabilitas [1]. Dalam pengelolaan Dana Desa, kinerja

keuangan juga menunjukkan kemampuan pemerintah desa dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan secara transparan, tepat waktu, serta sesuai standar akuntansi guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat [2].

Secara umum, kinerja keuangan menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kondisi suatu organisasi. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan regulasi yang berlaku agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan norma hukum tertulis yang mengikat dan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [3]. Namun demikian, keberadaan regulasi belum tentu secara langsung mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Kondisi tersebut disebabkan karena aparatur desa masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan berbagai aturan yang ada, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akibatnya, pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa belum berjalan secara optimal sehingga berdampak negative pada pengelolaan dan kinerja keuangan desa.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Desa. Permasalahan tersebut antara lain berupa kesulitan aparatur desa dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar, keterlambatan penyampaian laporan, serta keterbatasan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pengeluaran belanja modal di daerah juga belum sepenuhnya mampu meningkatkan pendapatan secara optimal [4]. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan Dana Desa belum berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel meskipun jumlah alokasi dana terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kenaikan alokasi Dana Desa dari waktu ke waktu belum sepenuhnya diiringi oleh kapasitas pengelolaan keuangan yang memadai di tingkat desa. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pengelolaan keuangan desa semestinya dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih tampak adanya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan. Hal ini tercermin dari belum maksimalnya penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan masih lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan sering kali baru terungkap setelah dilakukan pemeriksaan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa belum sepenuhnya terlaksana secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Fenomena ini penting dikaji karena prioritas Dana Desa 2025 menuntut pengelolaan keuangan desa yang lebih profesional. Keberhasilan program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kinerja keuangan pemerintah desa. Dalam hal ini, pola komunikasi organisasi dan gaya kepemimpinan kepala desa diduga memengaruhi kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan secara tertib dan sesuai aturan. Selain itu, tingkat pendidikan aparatur desa juga berperan dalam membantu pemahaman regulasi, penerimaan arahan, serta ketepatan pelaksanaan administrasi keuangan desa [5].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah desa masih belum optimal dalam mengelola dana publik secara profesional. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas, sehingga semakin baik laporan keuangan yang disusun maka semakin baik pula pertanggungjawabannya. Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan desa seharusnya menerapkan prinsip *good governance* yang menekankan aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Akan tetapi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan kapasitas aparatur, keterlambatan penyaluran dana, dan rendahnya transparansi pengelolaan keuangan. Padahal, pengelolaan yang terbuka dan akuntabel sangat diperlukan guna mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat [6]. Oleh karena itu, kinerja keuangan pemerintah desa menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan penerapan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa [7].

Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa adalah pola komunikasi organisasi. Komunikasi yang berlangsung secara terbuka dan dua arah antara kepala desa dengan aparatur desa dapat meningkatkan koordinasi kerja serta meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Dengan komunikasi yang efektif, proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dapat berjalan lebih terarah dan tertib sehingga dapat mengurangi terjadinya kesalahan administrasi. Sebaliknya, pola komunikasi yang kurang efektif dapat menghambat kinerja aparatur desa. Menurut penelitian lain, komunikasi merupakan proses penyampaian pesan, informasi, gagasan, maupun ide dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Komunikasi juga berperan dalam meningkatkan motivasi kerja dengan memberikan pemahaman mengenai tugas, pencapaian kerja, dan upaya perbaikan terhadap kinerja yang belum optimal [8]. Komunikasi satu arah dan terbatas sangat berdampak terhadap degradasi kinerja karyawan dalam suatu organisasi, informasi tidak tersampaikan dengan jelas sehingga karyawan tidak memahami tugas atau tanggung jawab mereka dengan baik [9].

Selain komunikasi, gaya kepemimpinan kepala desa merupakan faktor penting yang memengaruhi kinerja aparatur desa. Gaya kepemimpinan yang partisipatif dan komunikatif mampu menciptakan suasana kerja yang kondusif, serta meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja aparatur. Kepala desa yang tegas akan lebih mudah mengarahkan dan mengawasi aparatur dalam pengelolaan keuangan desa agar tetap disiplin dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemimpin yang mampu memberikan pesan baik dan arahan yang jelas berperan besar dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kepemimpinan memiliki peran strategis karena dapat mempengaruhi perilaku pegawai yang dipimpinnya. Kemampuan pemimpin dalam menyesuaikan diri dengan dinamika pembangunan juga menjadi faktor penting dalam mewujudkan tujuan organisasi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan mendukung percepatan pembangunan desa. Kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi dan menggerakkan orang lain agar bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu [10]. Jika pimpinan tidak mempunyai kompetensi memimpin, maka tugas-tugasnya tidak mampu dilaksanakan dengan baik. Sebuah organisasi memerlukan pemimpin yang efektif, yang memiliki keahlian mempengaruhi sikap anak buahnya. Tanpa adanya pimpinan, kegiatan perusahaan mungkin tidak akan berjalan. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian tujuan perusahaan [11].

Di sisi lain, tingkat pendidikan aparatur desa turut memengaruhi kemampuan dalam memahami regulasi, menerima arahan, dan menjalankan tugas pemerintahan secara baik. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kualitas kerja dan pemahaman aparatur desa sehingga berpotensi memperkuat pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap kinerja keuangan desa. Pendidikan merupakan salah satu bentuk kualitas sumber daya manusia yang sangat memengaruhi kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin luas pula pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki sehingga lebih mampu menjalankan tugas secara efektif. Ketentuan mengenai pendidikan minimal perangkat desa juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) yang menyebutkan bahwa perangkat desa minimal berpendidikan sekolah menengah atas atau sederajat [12].

Dalam penelitian ini, peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dijelaskan melalui pendekatan contingency theory. Teori ini menyatakan bahwa hubungan yang memengaruhi kinerja organisasi tidak bersifat mutlak, tetapi dipengaruhi oleh kondisi atau faktor situasional tertentu. Oleh karena itu, variabel moderasi diperlukan untuk menjelaskan kondisi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Tingkat pendidikan aparatur desa dipandang sebagai faktor situasional yang memengaruhi efektivitas pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Pendekatan ini juga memungkinkan adanya variabel lain yang dapat berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan kinerja organisasi.

Penelitian ini menggunakan agency theory sebagai dasar untuk menjelaskan antara hubungan principal dan agent. Dalam konteks pemerintahan desa, masyarakat berperan sebagai principal yang memberikan amanah kepada pemerintah desa untuk agent dalam mengelola keuangan dan sumber daya desa. Dengan demikian, hubungan ini berpotensi menimbulkan masalah seperti asimetri informasi dan konflik kepentingan, karena pemerintah desa memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan masyarakat. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas diperlukan sebagai bentuk pengendalian. Pola komunikasi efektif dan gaya kepemimpinan yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan informasi dan memastikan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai kepentingan masyarakat. Tingkat pendidikan aparatur desa juga dapat memperkuat pengendalian tersebut sehingga kinerja keuangan desa dapat meningkat.

Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada middle-range theory dan teori organisasi yang menekankan bahwa kinerja organisasi dipengaruhi oleh perilaku individu dan interaksi di dalam organisasi. Maka dari itu, komunikasi yang terbuka dapat meningkatkan koordinasi dan mengurangi kesalahan kerja, sedangkan kepemimpinan yang partisipatif mampu meningkatkan motivasi dan menciptakan lingkungan kerja yang baik. Dalam hal ini, kualitas sumber daya manusia, khususnya tingkat pendidikan, berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh komunikasi dan kepemimpinan terhadap kinerja organisasi. Kerja sama antara komunikasi, kepemimpinan, dan pendidikan menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Beji karena desa memiliki peran langsung dalam pengelolaan dana publik, sementara dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini memiliki unsur kebaruan dengan memasukkan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dalam mengkaji kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, penelitian ini difokuskan pada empat permasalahan utama, yaitu apakah pola komunikasi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, serta apakah tingkat pendidikan mampu memoderasi pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Rumusan masalah tersebut disusun untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan desa, khususnya pada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa di Kecamatan Beji. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis peran tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat atau memperlemah pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja keuangan pemerintah desa

Pola komunikasi dalam organisasi pemerintahan desa memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur desa. Komunikasi yang efektif memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang jelas, tepat, dan dua arah antara pimpinan dan aparatur desa, sehingga menciptakan kesamaan pemahaman mengenai tujuan, kebijakan, serta pembagian tugas. Dalam konteks pemerintahan desa, pola komunikasi yang terbuka dan partisipatif terbukti mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja desa, pola komunikasi organisasi yang efektif berpotensi meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian lain juga menemukan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja keuangan desa. Dalam Teori Agensi, komunikasi yang jelas dan dua arah diperlukan untuk mengurangi asimetri informasi serta memastikan aparatur menjalankan tugas sesuai tujuan organisasi [13].

Dari sudut pandang agency theory, komunikasi yang efektif juga mampu menekan terjadinya asimetri informasi serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, semakin baik pola komunikasi yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Selain itu, pola komunikasi yang efektif terbukti mendukung keberhasilan pelaksanaan program alokasi dana desa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa [14].

H1: Pola komunikasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Gaya kepemimpinan mencerminkan cara seorang pemimpin dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam pemerintahan desa, kepala desa memiliki peran strategis dalam

menentukan arah kebijakan serta menciptakan iklim kerja yang kondusif. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa maupun ASN. Selain itu, kepemimpinan yang efektif apabila didukung komunikasi yang baik akan memberikan pengaruh simultan terhadap peningkatan kinerja organisasi sektor publik. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang tepat diyakini mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa secara keseluruhan [15]. Selain itu, gaya kepemimpinan juga terbukti memengaruhi kinerja keuangan dalam organisasi ekonomi seperti koperasi. Dalam konteks pemerintahan desa, gaya kepemimpinan kepala desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara langsung berkaitan dengan kualitas pengelolaan keuangan desa. Secara teoretis, hal ini dijelaskan dalam teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin yang mampu memberikan inspirasi, motivasi, dan arahan yang jelas akan mendorong peningkatan kinerja bawahan. Oleh karena itu, semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa [10].

H2: Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Pemerintahan Desa

Tingkat pendidikan merupakan faktor penting dalam menentukan kualitas kinerja aparatur pemerintah desa. Aparatur dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki kompetensi teknis, kemampuan analitis, serta keterampilan komunikasi yang lebih baik sehingga mampu melaksanakan tugas secara profesional dan akuntabel. Pendidikan yang lebih tinggi juga meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan dan regulasi, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pengelolaan pemerintahan desa. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi dan tingkat pendidikan secara bersama-sama meningkatkan kinerja aparatur desa. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, semakin baik pula kinerja yang dihasilkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain itu, tingkat pendidikan juga terbukti memengaruhi kinerja aparatur desa secara signifikan dalam berbagai aspek pekerjaan. Penelitian lain menemukan bahwa latar belakang pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai aparatur desa. Secara teoretis, hubungan ini dapat dijelaskan melalui Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang menyatakan bahwa pendidikan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu sehingga berpengaruh pada peningkatan kinerja. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, maka semakin baik pula kinerja pemerintahan desa yang dihasilkan [11].

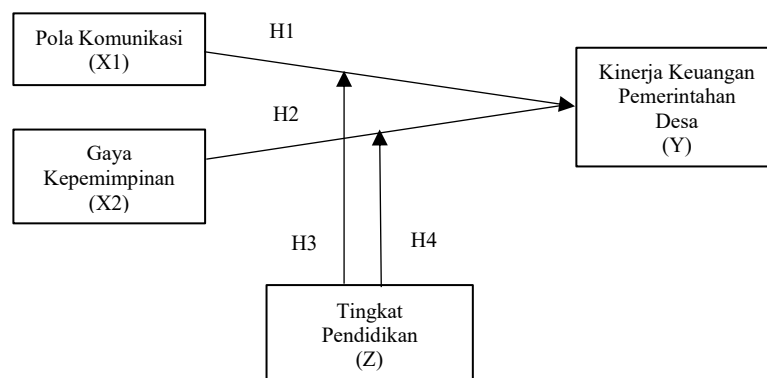
H3: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh pola komunikasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

Peran Tingkat Pendidikan sebagai Variabel Moderasi pada Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Selain memoderasi pengaruh pola komunikasi, tingkat pendidikan juga diduga memoderasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja keuangan pemerintah desa. Aparatur desa dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih adaptif terhadap gaya kepemimpinan partisipatif maupun transformasional, sehingga respons terhadap arahan pimpinan menjadi lebih efektif. Penelitian terkait pengelolaan APBDes menunjukkan bahwa tingkat pendidikan mampu memperkuat pengaruh faktor tata kelola terhadap pengelolaan keuangan desa. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendidikan aparatur desa menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja keuangan desa. Selain itu, dalam penelitian lain dijelaskan bahwa variabel kepemimpinan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara faktor organisasi dan kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik individu, termasuk tingkat pendidikan, dapat memengaruhi seberapa besar efektivitas kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja organisasi. Dengan demikian, tingkat pendidikan tidak hanya berpengaruh langsung terhadap kinerja, tetapi juga berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan pimpinan mampu memperkuat hubungan antara strategi organisasi dan kinerja keuangan [16].

H4: Tingkat pendidikan memoderasi pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa

Kerangka Konseptual



Gambar 1. Kerangka Konseptual

II.METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei melalui kuesioner berskala Likert. Pendekatan eksplanatori adalah penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antar variabel melalui pengujian hipotesis. Pendekatan kuantitatif eksplanatori bertujuan untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat antarvariabel melalui pengujian hipotesis dan analisis statistik [14]. Pada dasarnya, pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh pola komunikasi (X1) dan gaya kepemimpinan (X2) terhadap kinerja keuangan pemerintah desa (Y), dengan tingkat pendidikan (Z) sebagai variabel moderasi. Data yang diperoleh menggunakan analisis dengan cara statistik untuk memberikan bukti empiris mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian [17].

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa skor hasil pengisian kuesioner oleh responden terhadap indikator variabel penelitian. Data ini digunakan untuk mengukur pola komunikasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah desa secara terstruktur. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder [18]. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner karena mampu memberikan informasi yang sesuai dengan variabel penelitian. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung

seperti struktur organisasi desa, data aparatur desa, serta profil desa di Kecamatan Beji untuk memperkuat deskripsi objek penelitian dan mendukung kebutuhan informasi populasi.

Populasi

Penentuan populasi merupakan tahap penting dalam penelitian karena berkaitan dengan kualitas data yang akan diperoleh. Menurut peneliti lain, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh aparatur pemerintah desa yang berada di 14 desa di kecamatan beji dengan jumlah sebanyak 140 aparatur desa, karena aparatur desa merupakan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa [19].

Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan karakteristik tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak seluruh anggota populasi memiliki keterkaitan langsung dengan variabel yang diteliti, khususnya terkait pola komunikasi, gaya kepemimpinan, tingkat pendidikan, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Oleh karena itu, responden dalam penelitian ini dipilih dari aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan administrasi dan keuangan desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, kaur perencanaan, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [20].

Jumlah sampel dalam penelitian ini ditentukan menggunakan rumus *Lameshow* karena jumlah populasi belum diketahui secara pasti. Rumus ini digunakan untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan tertentu agar sampel dapat mewakili populasi penelitian. Rumus *Lameshow* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p(1 - p)}{d^2}$$

Dimana:

n = jumlah sampel

Z = nilai standar normal pada tingkat kepercayaan 95% (1,96)

p = estimasi proporsi populasi (0,5)

d = tingkat kesalahan (0,10)

Perhitungan sampel menggunakan rumus *Lameshow* adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{(1,96)^2 \cdot 0,5(1 - 0,5)}{(0,10)^2}$$

$$n = 96,04$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini dibulatkan menjadi 100 responden.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Pemilihan lokasi adalah proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan trade-offs antara biaya, aksesibilitas, dan tujuan strategi untuk mendapatkan lokasi yang paling optimal bagi suatu fasilitas atau aktivitas. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Beji karena lokasi tersebut sesuai dengan tujuan dan objek penelitian, yaitu aparatur pemerintah desa yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya yang berkaitan dengan inspeksi, pendelegasian wewenang, pengendalian internal, dan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan, yang meliputi tahap persiapan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, serta analisis data sehingga proses penelitian dapat berjalan secara sistematis [21].

Identifikasi dan Indikator Variabel

Definisi operasional diperlukan agar setiap variabel dalam penelitian dapat diukur secara jelas dan konsisten. Penelitian ini memiliki empat variabel, yaitu pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), tingkat pendidikan (Z), dan kinerja pemerintah desa (Y).

Tabel 1. Indikator dan Variabel

Variabel	Definisi Konseptual	Indikator	Skala
----------	---------------------	-----------	-------

Pola Komunikasi (X1)	Pola komunikasi adalah cara aliran informasi dan pertukaran pesan yang terjadi dalam organisasi desa antara pimpinan dan perangkat maupun antar perangkat, yang berfungsi untuk memperlancar koordinasi kerja dan mengurangi kesalahan pelaksanaan tugas [14].	1) Komunikasi vertikal (komunikasi antara atasan dan bawahan) 2) Komunikasi horizontal (komunikasi antar pegawai yang setara) 3) Komunikasi dua arah 4) Kejelasan informasi 5) Ketepatan penyampaian informasi	Likert 1-5
Gaya Kepemimpinan (X2)	Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan kepala desa dalam memengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi perangkat desa untuk mencapai tujuan organisasi, yang tercermin dari cara pemimpin mengambil keputusan, memberi arahan, dan melibatkan bawahan [22].	1) Partisipatif (bawahan ikut mengambil keputusan) 2) Delegatif (tugas diserahkan kepada bawahan) 3) Direktif (pemimpin memberi instruksi tegas)	Likert 1-5
Tingkat Pendidikan (Z)	Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal tertinggi yang telah diselesaikan oleh perangkat desa yang menunjukkan kapasitas pengetahuan dan kemampuan dasar individu dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa [23].	1) Kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan 2) Pemahaman regulasi (kemampuan memahami aturan yang berlaku) 3) Kemampuan administrasi (kemampuan mengelola dokumen dan laporan kerja)	Likert 1-5
Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y)	Kinerja keuangan pemerintah desa adalah tingkat keberhasilan pemerintah desa dalam merencanakan, merealisasikan, dan menggunakan anggaran desa secara tepat, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa [24].	1. Ketepatan penyusunan anggaran 2. Realisasi anggaran sesuai perencanaan 3. Efisiensi penggunaan anggaran	Likert 1-5

Sumber : diringkas oleh penulis

Teknik Analisis Data

Penelitian ini mengadopsi teknik analisis data berbasis *Partial Least Square* (PLS). PLS dapat mendeskripsikan hubungan antar variabel dan dapat dianalisis dalam sekali pengujian. Peneliti menggunakan PLS karena pada penelitian ini menggunakan variabel laten yang diukur dengan indikatornya. Sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisisnya menggunakan perhitungan yang jelas dan detail. Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (*outer model*) dan model struktural (*inner model*) [25].

1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana indikator mampu mengukur variabel yang diteliti secara tepat. Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan convergent validity dan discriminant validity.

Convergent validity dinilai berdasarkan nilai loading factor dan Average Variance Extracted (AVE). Suatu indikator dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading factor di atas 0,70 dan nilai AVE lebih dari 0,50. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan variabel yang diukur dengan baik. Selain itu, pengujian discriminant validity dilakukan untuk memastikan bahwa setiap variabel memiliki karakteristik yang berbeda dengan

variabel lainnya. Pengujian ini dilihat dari nilai akar kuadrat AVE yang harus lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi jawaban responden terhadap indikator penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Suatu variabel dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability lebih dari 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa indikator yang digunakan mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten.

2. Pengujian Model Struktural (Inner Model)

a. Uji R-Square (Coefficient of Determination)

Uji R-Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Semakin tinggi nilai R-Square, maka semakin besar kemampuan variabel pola komunikasi dan gaya kepemimpinan dalam menjelaskan kinerja keuangan pemerintah desa. Nilai R-Square sebesar 0,67 menunjukkan kategori kuat, nilai 0,33 menunjukkan kategori sedang, sedangkan nilai 0,19 menunjukkan kategori lemah.

b. Uji Path Coefficient

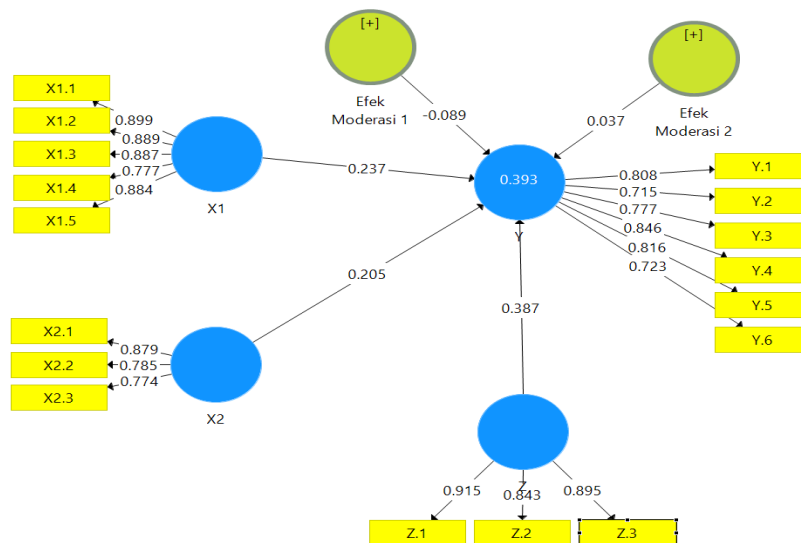
Pengujian path coefficient dilakukan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh antar variabel penelitian. Pengujian ini dilakukan melalui proses bootstrapping pada SmartPLS dengan melihat nilai T-statistics dan P-values. Hipotesis penelitian dinyatakan diterima apabila nilai T-statistics lebih besar dari 1,96 dan nilai P-values lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi terhadap model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas dari masing-masing konstruk (variabel). Berikut disajikan hasil penilaian terhadap *Outer Model* atau *Measurement Model*:



Gambar 2. Outer Model atau Measurement Model

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Hasil pemodelan menggunakan SmartPLS yang ditampilkan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (Z) memiliki nilai outer loading di atas 0,50. Dengan demikian, tidak terdapat indikator yang berada di bawah batas nilai tersebut, yang mengindikasikan bahwa seluruh indikator memenuhi syarat validitas konvergen.

Hasil Uji Validitas Convergent dan Discriminant

Nilai Average Variance Extracted (AVE) diperoleh dari hasil estimasi model outer menggunakan SmartPLS. Data berikut menunjukkan nilai AVE yang mengacu pada loading factor dengan nilai di atas 0,50.

Tabel 2. Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	AVE	Keterangan
X1	0,753	Valid
X2	0,663	Valid
Y	0,611	Valid
Z	0,783	Valid

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Tabel 2 menyajikan nilai Average Variance Extracted (AVE) untuk variabel pola komunikasi (X1), gaya kepemimpinan (X2), kinerja keuangan (Y), dan tingkat pendidikan (Z). Setiap konstruk menunjukkan nilai AVE yang melebihi 0,50, yang menandakan bahwa masing-masing konstruk memiliki validitas yang baik berdasarkan indikator kuesioner yang digunakan. Oleh karena itu, seluruh konstruk dalam penelitian ini dianggap memenuhi kriteria validitas. Model indikator yang digunakan adalah model reflektif, di mana hubungan antar variabel direpresentasikan melalui koefisien korelasi.

Tabel 3. Correlation of Latent Variables (Discriminant Validity)

Variabel	X1	Y	X2	Z
X1	0,868			
X2	0,211	0,814		
Y	0,379	0,410	0,782	
Z	0,286	0,363	0,358	0,885

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Berdasarkan Tabel 3, hasil uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Larcker menunjukkan bahwa nilai akar AVE pada setiap variabel lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Nilai akar AVE Pola Komunikasi sebesar 0,868, Gaya Kepemimpinan sebesar 0,814, Kinerja Keuangan sebesar 0,782, dan Tingkat Pendidikan sebesar 0,885. Dengan demikian, seluruh variabel penelitian telah memenuhi kriteria validitas diskriminan sehingga dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian.

Hasil Uji Reliabilitas

Hasil *output* SmartPLS *composite reliability* dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability	Keterangan
X1	0,939	Reliabel
X2	0,855	Reliabel
Y	0,904	Reliabel
Z	0,915	Reliabel

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Berdasarkan Tabel 4, seluruh konstruk dalam penelitian ini dinyatakan memenuhi kriteria reliabilitas. Hal ini dibuktikan dengan nilai *composite reliability* yang melebihi angka 0,70, sesuai dengan standar yang direkomendasikan.

Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hasil estimasi *R Square* dengan menggunakan SmartPLS

Tabel 5. Nilai *R-Square*

Variabel	<i>R Square</i>
Y	0,393

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Tabel 5, Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh nilai *R-Square* sebesar 0,393 pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Y). Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel Pola Komunikasi (X1), Gaya Kepemimpinan (X2), dan Tingkat Pendidikan (Z) mampu menjelaskan variasi Kinerja Keuangan Pemerintah Desa sebesar 39,3%, sedangkan sisanya sebesar 60,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Pengujian Signifikansi dan Pengujian Hipotesis

Diperoleh hasil untuk pengaruh langsung dan tidak langsung yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. *Path Coefficients*

Variabel	<i>Original Sample (O)</i>	<i>Sample Mean (M)</i>	<i>Standard Deviation (STDEV)</i>	<i>T Statistics (O/STDEV)</i>	<i>P Values</i>
X1 > Y	0,237	0,235	0,083	2,844	0,005
X2 > Y	0,205	0,218	0,084	2,455	0,014
Z > Y	0,387	0,391	0,080	4,858	0,000
X1 > Z > Y	-0,089	-0,080	0,082	1,084	0,279
X2 > Z > Y	0,037	0,044	0,069	0,532	0,595

Sumber: Pengolahan data primer (kuesioner), 2026

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Pola Komunikasi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,237 dengan nilai *P-value* sebesar 0,005 dan *T-statistik* sebesar 2,844. Nilai *P-value* yang lebih kecil dari 0,05 dan *T-statistik* yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Pola Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pola komunikasi yang diterapkan dalam pemerintahan desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,205 dengan nilai *P-value* sebesar 0,014 dan *T-statistik* sebesar 2,455. Nilai *P-value* yang lebih kecil dari 0,05 dan *T-statistik* yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,387 dengan nilai *P-value* sebesar 0,000 dan *T-statistik* sebesar 4,858. Nilai *P-value* yang lebih kecil dari 0,05 dan *T-statistik* yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan aparatur desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Hubungan Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara Pola Komunikasi melalui Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,089 dengan nilai P-value sebesar 0,279 dan T-statistik sebesar 1,084. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Koefisien jalur yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa Tingkat Pendidikan cenderung memperlemah hubungan tersebut, namun pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis keempat ditolak.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Hubungan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil pengujian menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara Gaya Kepemimpinan melalui Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,037 dengan nilai P-value sebesar 0,595 dan T-statistik sebesar 0,532. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Meskipun koefisien jalur bernilai positif yang mengindikasikan bahwa Tingkat Pendidikan cenderung memperkuat hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, hipotesis kelima ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pola Komunikasi memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,237 dengan nilai P-value sebesar 0,005 dan T-statistik sebesar 2,844. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Pola Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Artinya, semakin baik pola komunikasi yang diterapkan dalam lingkungan pemerintah desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Secara teoritis, komunikasi merupakan sarana penting dalam menyampaikan informasi, melakukan koordinasi, serta mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Komunikasi yang efektif memungkinkan aparatur desa memahami tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Menurut penelitian Yusnita (2025), mengatakan bahwa komunikasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur desa, yang secara tidak langsung berdampak pada kinerja keuangan desa [8]. Temuan penelitian ini memberikan indikasi bahwa pola komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu menciptakan keselarasan pemahaman antaraparatur desa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa yang melibatkan berbagai pihak dan tahapan administrasi, komunikasi yang efektif dapat meminimalkan kesalahan informasi, mengurangi potensi miskomunikasi, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat desa.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,205 dengan nilai P-value sebesar 0,014 dan T-statistik sebesar 2,455. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Gaya Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala desa, maka semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah desa. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima. Kepemimpinan yang efektif mampu memberikan arahan, motivasi, pengawasan, serta pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan keuangan desa. Kepala desa yang mampu membangun kerja sama, memberikan teladan, dan mengawasi pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Hasil penelitian ini mendukung teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa pemimpin memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi [10]. Selain itu. Menurut S.Nur Azizah (2024), mengatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi [15]. Temuan ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan faktor penting yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,387 dengan nilai P-value sebesar 0,000 dan T-statistik sebesar 4,858. Nilai P-value yang lebih kecil dari 0,05 dan T-statistik yang

lebih besar dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis ketiga diterima. Menurut *Human Capital Theory*, tingkat pendidikan dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan individu dalam melaksanakan pekerjaannya [14]. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pendidikan aparatur desa tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja, pelatihan, kompetensi, serta pemahaman terhadap regulasi keuangan desa. Selain itu menurut R.L.Puspitsari (2023), mengatakan bahwa tingkat pendidikan belum tentu mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa tanpa didukung faktor tata kelola yang memadai [12]. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pendidikan aparatur desa tidak selalu diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa. Dalam praktiknya, keberhasilan pengelolaan keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh pendidikan formal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman kerja, pelatihan, keterampilan teknis, serta pemahaman terhadap regulasi pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, meskipun tingkat pendidikan merupakan modal penting bagi aparatur desa, faktor-faktor lain tetap diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja keuangan pemerintah desa.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara Pola Komunikasi dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa melalui Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien jalur sebesar -0,089 dengan nilai P-value sebesar 0,279 dan T-statistik sebesar 1,084. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh Pola Komunikasi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis keempat ditolak. Meskipun koefisien jalur bernilai positif yang mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan cenderung memperkuat hubungan antara pola komunikasi dan kinerja keuangan pemerintah desa, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Menurut Anggara (2026), mengatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mampu memoderasi hubungan antara faktor organisasi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes [26]. Berdasarkan Teori Stewardship, keberhasilan organisasi lebih ditentukan oleh komitmen dan tanggung jawab aparatur dalam mencapai tujuan organisasi daripada tingkat pendidikan formal yang dimiliki [13]. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas komunikasi dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa tidak bergantung pada tingkat pendidikan aparatur desa. Faktor lain seperti pengalaman kerja, budaya organisasi, serta kemampuan koordinasi antaraparatur kemungkinan memiliki peran yang lebih besar dalam mendukung efektivitas komunikasi organisasi.

Peran Tingkat Pendidikan dalam Memoderasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tidak langsung antara Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Desa melalui Tingkat Pendidikan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,037 dengan nilai P-value sebesar 0,595 dan T-statistik sebesar 0,532. Nilai P-value yang lebih besar dari 0,05 dan T-statistik yang lebih kecil dari 1,96 menunjukkan bahwa Tingkat Pendidikan tidak mampu memoderasi pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa. Dengan demikian, hipotesis kelima ditolak. Koefisien jalur yang bernilai negatif menunjukkan bahwa tingkat pendidikan cenderung memperlemah hubungan antara gaya kepemimpinan dan kinerja keuangan pemerintah desa, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini mengindikasikan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan aparatur desa. Dengan kata lain, gaya kepemimpinan tetap memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa tanpa bergantung pada tinggi rendahnya tingkat pendidikan aparatur yang dimiliki. Hasil ini sejalan dengan Anggara (2026) menyatakan bahwa tingkat pendidikan tidak mampu memperkuat pengaruh faktor organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBDes [26]. Selain itu, Teori Stewardship menjelaskan bahwa keberhasilan kepemimpinan lebih ditentukan oleh komitmen dan orientasi pada kepentingan organisasi dibandingkan latar belakang pendidikan formal aparatur [13]. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas kepemimpinan kepala desa dalam meningkatkan kinerja keuangan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan aparatur, melainkan oleh kemampuan pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengoordinasikan aparatur desa.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pola komunikasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa dengan tingkat pendidikan sebagai variabel moderasi pada aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji, dapat disimpulkan bahwa pola komunikasi dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Temuan ini menunjukkan bahwa

komunikasi yang berjalan dengan baik mampu meningkatkan koordinasi, memperlancar penyampaian informasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, gaya kepemimpinan yang efektif juga berperan dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Sementara itu, tingkat pendidikan terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah desa, namun tidak mampu memoderasi hubungan antara pola komunikasi maupun gaya kepemimpinan dengan kinerja keuangan pemerintah desa. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan kinerja keuangan desa tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan aparatur, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung lainnya dalam lingkungan organisasi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Ruang lingkup penelitian yang hanya mencakup aparatur pemerintah desa di Kecamatan Beji menyebabkan hasil penelitian ini belum dapat digeneralisasikan secara luas pada daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini hanya memfokuskan pada variabel pola komunikasi, gaya kepemimpinan, dan tingkat pendidikan sehingga masih terdapat berbagai faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa tetapi belum dianalisis dalam penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian serta menambahkan variabel lain yang relevan, seperti kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, transparansi, akuntabilitas, dan komitmen organisasi. Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan penelitian berikutnya dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan adik penulis, terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta segala pengorbanan dan dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah penulis. Meskipun tidak semua rasa diungkapkan melalui kata-kata, penulis percaya bahwa cinta dan harapan kalian selalu menjadi kekuatan terbesar hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Sahabat-sahabat penulis, terutama Ayudya, Riza, Alvi, Vita, dan Donny, terima kasih telah menjadi bagian dari setiap proses perjuangan ini. Terima kasih atas kebersamaan, semangat, doa, motivasi, serta tawa yang selalu menguatkan penulis dalam setiap suka dan duka.
3. Seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, terima kasih karena selalu menemani, mendengarkan setiap keluh kesah, mengingatkan penulis untuk tidak menyerah, dan tetap percaya kepada penulis, bahkan ketika penulis mulai meragukan diri sendiri.

REFERENSI

- [1] A. Azizah, S. Sulistyono, and R. I. Mustikowati, "Pengaruh Perencanaan Desa, Penerapan Akuntansi Desa dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa," *J. Akunt. Neraca*, vol. 2, no. 2, pp. 1–6, 2025, doi: 10.59837/jan.v2i2.387[2] W. Java, "Sosyoekonomi Determinants of Accountability for The Management of Funds Vis- À -Vis Village Governments in Indonesia (Empirical Case in," vol. 31, no. 56, pp. 191–204, 2023, doi: 10.17233/sosyoekonomi.2023.02.09.
- [3] D. Rulyanti, R. A. Sularso, F. Ekonomi, and U. Jember, "Desa Sebagai Variabel Intervening," vol. 11, no. 3, pp. 323–335, 2017.
- [4] Antari, "MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH," vol. 7, no. 2, pp. 1080–1110, 2018.
- [5] "Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 'Prioritas Penggunaan Dana Desa 2025 Fokus Ketahanan Pangan dan Kemiskinan,' 2024. [Online]. Available: <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/5704/kemendes-prioritas>".
- [6] Achmad and Misnaini, "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Duwet Panarukan Situbondo," *Al-Idarah J. Manaj. dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 45–58, 2021, doi: 10.35316/idarrah.2021.v2i2.45-58.
- [7] L. Yunita Sari, Nelly Masnila, and Desi Indriasari, "Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Desa, dan Integritas Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas," *JEMSI (Jurnal Ekon. Manajemen, dan Akuntansi)*, vol. 10, no. 5, pp. 2874–2878, 2024, doi:

- 10.35870/jemsi.v10i5.3086.
- [8] M. S. Yusnita and R. Gusrianisa, "Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pola Komunikasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Desa Cikole," *J. Adm. Kant.*, vol. 13, no. 1, pp. 86–100, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal-binainsani.ac.id/index.php/JAK/article/view/3438>
 - [9] G. P. Vian and H. A. T. Sugianto, "Analisis Dampak Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan DPMPSTP Di Kabupaten Perbatasan," *RIGGS J. Artif. Intell. Digit. Bus.*, vol. 4, no. 2, pp. 3001–3012, 2025, doi: 10.31004/riggs.v4i2.965.
 - [10] M. Rosalina and L. N. Wati, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Disiplin Kerja Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Karyawan," *J. Ekobis Ekon. Bisnis Manaj.*, vol. 10, no. 1, pp. 18–32, 2020, doi: 10.37932/j.e.v10i1.26.
 - [11] W. Purnamasari, L. D. A. Indrayanti, and N. L. Fittriya, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Internal dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan," *INOBIS J. Inov. Bisnis dan Manaj. Indones.*, vol. 2, no. 2, pp. 193–205, 2019, doi: 10.31842/jurnal-inobis.v2i2.84.
 - [12] R. L. Puspitasari, D. D. Astuti, and W. F. Ningsih, "Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Efektivitas Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Tanjungrejo Kecamatan Wuluhan," *Riemba - J. Ris. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Akunt.*, vol. 1, no. 1, pp. 121–134, 2023, doi: 10.31967/riemba.v1i1.941.
 - [13] Eko Raharjo, "TEORI AGENSI DAN TEORI STEWARSHIP DALAM PERSPEKTIF AKUNTANSI (Agency)," *Enterp. Risk Manag.*, pp. 31–41, 2020.
 - [14] A. Aman-Ullah, W. Mehmood, S. Amin, and Y. A. Abbas, "Human capital and organizational performance: A moderation study through innovative leadership," *J. Innov. Knowl.*, vol. 7, no. 4, p. 100261, 2022, doi: 10.1016/j.jik.2022.100261.
 - [15] S. Nur Azijah, R. Rahmawati, Rusliandy, C. Wahyudin, and N. Anak Lydon, "Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai," *J. Governansi*, vol. 10, no. 1, pp. 1–14, 2024, doi: 10.30997/jgs.v10i1.11009.
 - [16] M. Shodikin *et al.*, "Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderasi the Influence of the Village Head ' S Leadership Style and Competence on Village Officials Officials on the Performance of Village Officials With Job Satisfaction As a Moderating Variable," vol. 50, no. 2, pp. 190–206, 2024, doi: 10.33701/jipwp.v50i2.4691.
 - [17] S. Kurnianto, K. Prasetyo, A. A. G. S. Utama, C. Angelina, and A. S. Rahmani, "jenis jenis peneltian," *Cogent Bus. Manag.*, vol. 13, no. 1, Dec. 2026, doi: 10.1080/23311975.2025.2611643.
 - [18] D. Assayakurrohim, D. Ikhrum, R. a Sirodj, and M. W. Afgani, "Jurnal pendidikan sains dan komputer metode studi kasus dalam penelitian kualitatif jurnal pendidikan sains dan komputer," *J. Pendidik. sains dan Komput.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–9, 2023.
 - [19] H. Sihotang, "H. Sihotang, Metode Penelitian Kuantitatif. 2023."
 - [20] A. A. N. Gunawan, I. W. Suharta, and I. B. M. Suryatika, *Di Era Digital : Mutiara Intelektual Indonesia*.
 - [21] Z. Haoxing and C. System, *SUGIONO*.
 - [22] P. P. Asih and I. Raharja, "Peran Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan di Kantor Desa Serang Kabupaten Bekasi Program Studi Manajemen , Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Bina Sarana Informatika , dalam mencapai tujuannya . Efektivitas kerja karyawan dipengar," vol. 5, no. 2, pp. 1165–1176, 2025.
 - [23] Y. Rach aw ati, "Pendidikan karakter melalui metode pembelajaran," pp. 1–10, 2018.
 - [24] Refky Tooy, Harun Blongkod, and Ikhlal UL Aqmal, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa: Studi pada Desa-desa di Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo," *Al-Kharaj J. Ekon. Keuang. Bisnis Syariah*, vol. 7, no. 5, pp. 1534–1545, 2025, doi: 10.47467/alkharaj.v7i5.7156.
 - [25] Fatimah, "Fatimah and Nuryaningsih Buku Ajar ,2018".
 - [26] Anggara, R. Kusumastuti, dan M. Gowon, "Analysis of the Use of Seskeudes, Human Resource Competence, and Government Internal Control System on the Accountability of Village Revenue and Expenditure Budget Management with Education Level as a Moderating Variable," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, vol. 8, no. 2, pp. 1042–1055, 2025.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.